PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, LAIN- LAIN PENDAPATAN YANG SAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DI PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Skripsi

Nama : Imam Sri Bintang
Nim : 222014313

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019

Skripsi

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, LAIN- LAIN PENDAPATAN YANG SAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DI PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Diajukan untuk Menyusun Skripsi Pada
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

Nama : Imam Sri Bintang

Nim : 222014313

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2019

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal di Pemerintah Kota Palembang.
Nama	: Imam Sri Bintang
NIM	: 22 2014 313
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Study	: Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	: Akuntansi sektor publik

Diterima dan disahkan
PadaTanggal 4 FEBUARI 2019

Pembimbing I

Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

Pembimbing II

Muhammad Fahmi,.S.E.,M.Si
NIDN/NBM: 0029097804/1197277

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Prodi Akuntansi

Betri Sirajuddin.S.E.,M.Si.,Ak.,CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Imam Sri Bintang
NIM	: 222014313
Program Studi	: Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar , maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku

Palembang, 2019

Penulis

METERAI TEMPEL

6000

(Imam Sri Bintang)

ABSTRAK

Imam Sri Bintang /222014313/ 2019/ Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain pendapatan yang sah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota Palembang (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang) / Akuntasi Sektor Publik

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Yang Sah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Pemerintah Kota Palembang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pemerintah kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data nilai Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain pendapatan yang sah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal tahun 2014-2017. Teknik pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain pendapatan yang sah dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota Palembang.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal

Abstract

Imam Sri Bintang/222014313/2019/The Influence of Local Tax and Local Retribution toward legal Revenue and Public Fund Allocation toward Capital Budgetting in Palembang (A Case-study of regional financial and assest management Institution in Palembang)/ Public Sector Accounting

This research was formulated whether or not there was a significant influence of regional taxes, regional levies, other legitimate income, and general allocation funds toward capital expenditure in Palembang. This research was aimed at determining the influence of local taxes, regional retribution, other legal income, and general allocation funds toward capital expenditure in Palembang. This type of research was an associative research. The data used was secondary data in line with data on the value of Regional Taxes, Regional Levies, Other legitimate income, General Allocation Funds, and Capital Expenditures within 2014-2017. Data collection technique used was documentation. The data analysis method used in this study was quantitative. The results of the study showed that Regional Taxes, Regional Levies, Other legitimate income and General Allocation Funds had a significant influence toward Capital Expenditures Palembang.

Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, Other legitimate income, General Allocation Funds, Capital Expenditures

PENGESAHAN
NO. 92 /Abstract/LB/UMP/ 11 / 2019
Telah di Koreksi oleh
Lembaga Bahasa
Universitas Muhammadiyah Palembang

بسم الله الرحمن الرحيم

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain pendapatan yang sah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota Palembang ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang dijadwalkan. Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih terutama kepada kedua orangtua (**Iskandar** dan **Surni**) beserta kakak-kakakku do'a dan bantuannya memiliki makna besar dalam proses ini. Penults juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak **Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA** selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak **Muhammad Fahmi,.S.E., M.Si** selaku Dosen Pembimbing 2 , yang telah membimbing dan memberikan pengarahan, motivasi serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/'karyawati.

2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karya wan/karyawati.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA dan Ibu Nina Sabrina , S.E., M.Si. Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Mella Handayani, S.E., Ak., M.Si selaku pembimbing akademik saya.
5. Bapak dan Ibu dosen serta staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Kantor BPKAD Kota Palembang
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi skripsi ini masih jauh dari sempuma. Meskipun demikian mudah-mudahan dari skripsi ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2019

Penulis

(Imam Sri Bintang)

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iv

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO v

HALAMAN PRAKATA vi

HALAMAN DAFTAR ISI viii

HALAMAN DAFTAR TABEL xi

HALAMAN DAFTAR GAMBAR xii

ABSTRAK xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori 10

1. Teori Stake holder 10

2. APBD 12

3. Pajak Daerah 17

4. Retribusi daerah 22

5. Belanja Modal 33

6. Lain-lain pendapatan yang sah 38

7. Dana Alokasi Umum 38

B. Penelitian Sebelumnya 39

C. Kerangka Pemikiran 40

D. Hipotesis 41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 44

B. Lokasi Penelitian 44

C. Operasional Variabel 45

D. Populasi dan Sampel 46

E. Data yang Diperlukan 47

F. Metode Pengumpulan Data 47

G. Analisis Data dan Tcknik Analisis 48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 57

1. Scjarah BPKAD Kota Palembang 57

2. Visi dan Misi 58

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 60

4. Tugas dan Tanggung Jawab 62

B. Pengelolaan Data 67

1. Hasil pengelolaan data 67

a. Analisis Data Deskriptif 67

2. Uji Asumsi Klasik 68

a. Uji Normalitas 68

b. Uji Multikolinearitas..... 70

c. Uji Auto korelasi 71

d. Uji Heterokedastisitas..... 72

3. Koefisien Determinasi..... 73

4. Regresi Linear Berganda 74

5. Uji Hipotesis..... 76

a. Uji Hipotesis secara Bersama (Uji F) 76

b. Uji Hipotessi secara Parsial (Uji t) 78

C. Pembahasan..... 81

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 86

B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran umum, sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan akan habis. Pemerintahan daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung pendapatan asli daerah (PAD).

Rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilkinya. Pemerintahan daerah diharapkan lebih mampu mengenali suber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan didaerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD). Semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi (P3D) kedaerah.

Pemungutan pajak merupakan alternative yang paling potensial dalam meningkatkan pendpatan Negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Jenis pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bead an chukai, dan penerimaan negara bukan pajak.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi telah diautur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Melalui otonomi ini diharapkan kabupaten dan kota akan lebih mandiri dalam menentukan kegiatannya, serta mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya maupun dalam mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing.

Pada tahun 2011 kota Palembang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat ketika kota Palembang ditunjuk sebagai tuan rumah Sea Games yang ke 26. Kota Palembang mengalami pembangunan seperti jalan, mall, hotel dan lainnya. Setelah Sea Games yang ke 26 dilaksanakan, kota Palembang sering ditunjuk sebagai tuan rumah untuk acara seperti Islamic Games dan fasilitas yang dibangun untuk Sea Games yang ke 26 dapat

menjadi pariwisata kota Palembang. Sea Games yang ke 26 berdapak positif terhadap masyarakat kota Palembang yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengusaha tertarik untuk membangun usahanya di kota Palembang (Tierta, 2011).

Pajak daerah dan retribusi daerah di kota Palembang akan mengalami perkembangan serta peningkatan karena pada tahun 2018 diadakan Asian Games. Kota Palembang dipilih sebagai tuan rumah Asian Games pada tahun 2018. Hal ini membuat daerah kota Palembang mengalami banyak perkembangan dan kemajuan dari tahun 2011 sampai 2015. Seperti pembangunan kota Palembang tahun 2011 yaitu perbaikan Jalan Jakabaring dan perbaikan Glora Sriwijaya, tahun 2012 dan 2013 pembangunan fly over simpang jakabaring, 2014 pembangunan Tol kayu Ayung, Palembang, Betung dan Pembangunan Underpass Patal, dan tahun 2015 pembangunan Jalan Kebun Sayur, pembangunan fly over simpang Bandara, fly over Keramasan, pembangunan tugu belido, pembangunan sirkuit di Jakabaring, pembangunan Light Rail Transit, pembangunan hotel, mall, dan lainnya. Perkembangan kota Palembang membuat pengusaha tertarik untuk membangun usahanya di kota Palembang. Sehingga pemerintahan kota Palembang banyak mendapatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah merupakan bagian pendapatan asli daerah yang terbesar, kemudian diikuti dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Pajak

daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan dari pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Lain-lain pendapatan yang sah menurut UU 32 Tahun 2004 pasal 164 ayat 1 tentang pemerintah daerah adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Lain-lain pendapatan yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah seperti yang disampaikan oleh Yuriko (2013:8) Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas : 1) Pendapatan Hibah, 2) Dana darurat, dan 3) Pendapatan lainnya. (Kristinawati, 2017)

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke

pemerintah daerah.Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin 2010 dalam Ardhani 2011). Hasil penelitian Darwanto & Yulia (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. al. (1985) dalam Hariyanto & Adi (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. (Wandira, 2013)

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005). (Oktora, 2013)

Prinsip pungutan pajak dan retribusi daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang pada prinsipnya memandang bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah perlu menekan prinsip-prinsip demokrasi. Adolof Wagner menegaskan bahwa untuk membiayai pengeluaraan negara terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai akibat dari kegiatan pemerintah yang semakin meningkat idealnya ditutup dari pungutan pajak. (Apituley, 2009)

Hasil penelitian Zahari (2018) yang menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dan retribusi daerah tidak pengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan penelitian Handayani (2012) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Penelitian Apituley (2009) menyatakan bahwa Hal yang demikian menyebabkan angka Pendapatan Asli Daerah berfluktuasi sejalan dengan fluktuasi yang terjadi pada angka realisasi pendapatan asli daerah. Penelitian Kusuma (2013) yang manyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD. Penelitian Putra (2014) menyatakan bahwa penerimaan retribusi daerah dari jenis retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha mengalami penurunan persentase efektifitas, sedangkan pada retribusi perizinan tertentu mengalami kenaikan persentase efektifitas. Penelitaian Hendaris (2013) menyatakan bahwa Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Penelitian Tuasikal (2008) menyatakan bahwa secara PAD berpengaruh postif terhadap alokasi belanja modal daerah kabupaten/kota di Indonesia. Sementara PDRB tidak berpengaruh. Penelitian Oktora (2013) menyatakan bahwa Hasil uji korelasi PAD dengan Belanja Modal menunjukkan terdapat hubungan yang kurang erat akibat rendahnya proporsi PAD dalam komposisi Pendapatan Daerah.

Badan pengelolaan keuangan dan asset daerah (BPKAD) kota Palembang merupakan unsur SKPD pemerintah daerah kota Palembang yang

dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota Palembang. Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) kota Palembang merupakan satuan kerja perangkat daerah dalam menajalankan roda pemerintahan di dasarkan kepada kebijakan umum daerah kota Palembang BPKAD sebagai salah satu SKPD sesuai kedudukan, tugas pokok dan fungsinya memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berikut data yang diperoleh dari BPKAD Kota Palembang mengenai data pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain yang sah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal Kota Palembang pada tahun 2014-2017

Tabel I.1

Pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah, dan dana alokasi umum belanja daerah kota Palembang Periode 2014-2017

Tahun	Bulan	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Dana Alokasi Umum	Belanja Modal
2014	Maret	26.733.040.363,00	6.179.720.515,69	7.900.257.047,54	100.305.201.000,00	1.676.883.200,00
	April	35.392.397.964,00	12.926.833.567,41	7.797.327.297,32	100.305.201.000,00	6.802.030.150,00
	Mei	32.283.030.717,00	4.790.3224.156,00	12.701.470.473,47	100.305.201.000,00	51.912.047.790,00
	Juni	40.262.063.558,00	8.582.244.534,00	23.553.130.548,14	100.305.201.000,00	64.524.110.369,00
	Agustus	45.168.614.417,00	4.542.473.897,00	13.719.462.852,86	200.610.402.000,00	33.090.813.750,00
	September	64.327.100.287,00	6.936.882.032,00	6.934.192.456,52	100.305.201.000,00	41.936.380.650,00
	Oktober	32.905.077.078,00	9.641.249.019,00	21.272.204.638,98	100.305.201.000,00	60.129.235.052,00
	November	31.171.220.512,16	6.467.236,678,00	20.795.204.249,22	100.305.242.000,00	61.917.470.934.00
2015	Maret	94.628.519.293,00	21.722.776.563,00	28.244.120.362,41	403.534.980.000,00	679.252.050,00
	April	123.854.401.561,00	28.784.874.244,00	41.773.079.878,26	504.418.725.000,00	3.522.930.975,00
	Mei	159.805.517.659,00	35.925.881.487,00	60.636.812.938,94	605.302.470.000,00	13.519.876.460,00
	Juli	237.244.464.966,00	48.928.037.917,00	82.523.249.974,83	807.069.960.000,00	119.757.158.405,00
	September	365.254.333.981,00	58.011.679.751,00	110.826.374.901,66	1.008.837.450.000,00	241.665.648.043,00
	Oktober	399.559.039.558,00	62.720.422.981,00	124.378.172.511,45	1.109.721.195.000,00	328.786.742.340,00
2016	Februari	72.530.397.377,00	9.291.193.564,00	16.773.468.971,60	323.031.213.000,00	236.600.000,00
	Maret	107.102.773.517,00	14.066.390.303,00	23.432.820.206,22	430.708.284.000,00	4.533.570.500,00
	April	141.196.027.700,00	19.394.023.102,00	34.767.645.070,78	538.385.355.000,00	18.836.988.393,00
	Mei	181.451.531.368,00	24.685.641.216,00	45.408.259.101,05	646.062.426.000,00	40.967.593.736,00
	Juni	233.406.694.385,00	30.574.492.599,00	62.357.778.044,28	753.739.497.000,00	125.476.058.945,00
	November	497.252.764.705,00	60.306.113.953,00	110.186.496.218,81	1.292.124.896.000,00	443.533,578,443,13
	Desember	536.553.681.049,38	75.946.671.693,10	118.520.950.697,55	1.292.124.896.000,00	577.697.336.830,45
2017	Februari	37.575.116.990,00	5.022.007.170,00	43.635.872.885,31	107.677.071.000,00	122.704.000,00
	Maret	65.033.823.723,00	8.156.258.988,00	10.562.516.151,03	107.677.071.000,00	2.995.002.990,00
	April	49.449.914.221,00	5.377.264.953,00	8.048.409.861,65	107.677.071.000,00	1.169.905.760,00
	Mei	49.965.553.979,00	4.398.274.272,00	76.055.629,482,97	107.677.071.000,00	18.308.555.264,00
	Juni	42.178..799.833,00	3.245.580.320,00	7.538.156.876,80	107.677.071.000,00	60.934.681.508,00
	Juli	50.399.977.218,00	4.070.668.969,00	12.226.102.072,99	107.677.071.000,00	49.424.005.424,00
	Agustus	65.751.595.929,00	3.945.530.552,00	11.800.159.970,43	107.677.071.000,00	78.535.521.256,00
	September	122.633.965.211,80	4.920.825.467,00	41.566.033.015,11	100.110.926.000,00	55.360.013.489,00

Sumber:Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang (2018)

Berdasarkan Tabel I.1 menujukan bahwa belanja modal mengalami peningkatan tetapi pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah dan dana alokasi umum mengalami fluktuasi atau naik turun. Kebutuhan belanja daerah yang terus meningkat ini, tentunya harus seimbang dengan adanya peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain lain pendapatan yang sah. Seharusnya bisa dimaksimalkan lagi untuk , menambah sumber penerimaan yang diterima oleh daerah. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan

perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk penelitian yang berjudul "**Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Yang Sah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Pemerintah Kota Palembang"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Yang Sah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Pemerintah Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka dapat di tentukan tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pemerintah kota Palembang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis

   Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan baru bagi penulis tentang pengaruh pajak daerah,retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal di pemerintah kota Palembang.

2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan juga masukan yang berguna bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang mengenai pengaruh pajak daerah,retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal di pemerintah kota Palembang

3. Bagi Almamater

   Sebagai bahan referensi dan acuan bagi pihak-pihak lain yang melaksanakan penelitian dan pembahasan terhadap masalah potensi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Apituley Margaretha, (2009). *Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Maluku Tenggara*.

(http://ejurnal.ukim.ac.id/index.php/peluang/article/view/141) diakses 01 November 2018 pukul 18.30 WIB.

Baldric Siregar, (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah***.** UPP TIM YKPN. Yogyakarta.

Erlina, (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah berbasis akrual*. Salemba 4. Jakarta.

Hamdani, (2016). *Good Corporate Governance. Badan Penerbit, Mitra Wacana* Media Jakarta,

Handayani, (2012). *Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun*.

(http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/assets/article/view/541) diakses 01 November 2018 pukul 19.00 WIB.

Hendaris, B, (2013). *Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada kota/kabupaten di wilayah provinsi jawa barat.* (http://repository.fe.unjani.ac.id/pdf/147-152_PENGARUH_PENERIMAAN_PAJAK_DAERAH_DAN_RETRIBUSI_DAERAH.pdf) diakses 01 November 2018 pukul 19.20 WIB.

Kristinawati, E, (2017). *Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain- lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal di Jawa Timur.* (file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/8251-15525-2-PB.pdf) diakses 01 November 2018 pukul 19.35 WIB.

Kusuma, A, (2013). *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/kota di Provinsi Bali.* (https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/7422) diakses tanggal 01 November 2018 pukul 19.30 WIB.

Oktora, (2013). *Analisis hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus atas Belanja Modal pada pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi tengah.*

(https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/accountability/article/view/2337) diakses tanggal 01 November 2018 pukul 19.00 WIB.

Putra, (2014). *Analisis efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (studi pada dinas pengelola keuangan daerah kota blitar).* (http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/442/640).

Saidi, (2011). *Pembaruan Hukum Pajak Edisi Revisi.* Rajawali Pers. Jakarta.

Samudra, Azhari Aziz, (2016). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan,Pajak dan Retribusi daerah.*Jakarta

Siahaan, Marihot P, (2013).*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta

Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan kelima belas. Alfabeta. Bandung.

Suandy,E, (2014). *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.

Tuasikal, A, (2008). *Pengaruh dau, dak, pad, dan pdrb terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia,* (http://jurnal.unsyiah.ac.id/TRA/article/view/299) diakses tanggal 01 November 2018 pukul 18.40 WIB.

Utang Rosidin, (2015). Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. *Tentang Perpajakan***.** Jakarta.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta.

Undang- Undang N0. 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah***.** Jakarta.

Wandira,A. (2013). *Pengaruh pad, dau, dak, dan dbh terhadap Pengalokasian belanja modal.* (https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/1158) diakses tanggal 02 November 2018 pukul 19.00 WIB.

Zahari,M. (2018). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Jambi.*

(http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/531) diakses tanggal 01 November 2018 pukul 18.35.